



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Anggaran Bombastis, Sanitasi DKI Buruk

JAKARTA - DKI Jakarta melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) memiliki dana yang bombastis. Ironisnya, sanitasi di wilayah ibu kota justru sangat buruk. Alhasil, berdasarkan laporan masyarakat, Partai Nasdem dan PDI Perjuangan menyoroti hal tersebut.

Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta angkat bicara soal masalah buruknya sanitasi warga Gang Sekretaris, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Anggota DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengakui banyak sekali laporan dari masyarakat yang datang ke fraksi.

Salah satunya masalah sanitasi. Akibatnya, masih ada warga Jakarta yang membuang hajat di kali. "Inilah kebiasaan Pemprov DKI itu, ada masalah dulu baru kemudian bergerak. Enggak ada perencanaan yang jelas," ungkap dia kepada INDOPOS di gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2019).

Padahal, menurut Nova, sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar yang wajib terpenuhi. "Seharusnya ada

skala prioritas, sebenarnya harus dilihat dulu masalah warga Jakarta apa, sanitasi itu kan utama. Kalau sekarang baru action setelah ada kejadiannya saya kira salah," tandas politisi Partai Nasdem itu.

Terlebih, APBD DKI Jakarta 2019 ini mencapai Rp89,08 triliun. Namun, Pemprov DKI belum bisa menyediakan sanitasi yang layak bagi warganya. "Ini ironi bagi saya, dengan anggaran lebih dari Rp80 triliun, tapi skala seperti ini enggak bisa diprioritaskan," kata Nova.

Nova menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta bisa saja menyediakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di tengah pemukiman padat bagi masyarakat. "Padahal, itu kan tinggal disediakan lahan saja, enggak sulit. Tapi mungkin Pemprov enggak concern masalah ini, mungkin terlalu banyak kerjaan. Ini hal mudah, di rumah pada penduduk untuk bukin IPAL Komunal," imbuh dia.

Ketua Fraksi Partai Nasdem DKI Jakarta Wibi Andriano mengamini hal itu. Dia mengatakan, sebagian besar warga Jakarta sebenarnya sudah terbebas

dari buang air besar sembarangan (BABS). Sebab berdasarkan data Kementerian Kesehatan, dia mengungkapkan, 96 persen warga telah memiliki sanitasi bersih.

"Solusi jangka pendek tentu, yang saat ini ditawarkan pemprov dengan membuat septic tank komunal di 30 titik yang dianggarkan pada KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara-red) 2020 sebesar Rp166,2 milyar. Kami berharap anggaran tersebut sudah termasuk perawatan, yakni penyedotan rutin septic tank," beber dia kepada INDOPOS di lokasi yang sama.

Menurut Wibi, permasalahan itu berawal dari buruknya tata kota di Jakarta. Untuk itu, perlunya mengembalikan fungsi dari perizinan, seperti izin mendirikan bangunan (IMB). Sehingga setiap rumah yang dibangun harus bertanggungjawab atas limbahnya.

"Namun begitu, untuk menata ulang bukanlah hal mudah karena berpotensi merugikan banyak warga. Hal ini menjadi solusi ke depan yang harus dibangun, regulasi harus melindungi masyarakat," tutur Wibi.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, pembangunan sanitasi layak di kawasan Kali Sekretaris, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat sudah masuk dalam rencana penataan kawasan kumuh.

Ia pun menyebut, program itu telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). "Memang ada rencana penataan kampung kumuh, kami tinggal menunggu direalisasikan saja," ucap dia kepada INDOPOS di gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2019).

Bahkan, lanjut dia, dana sebesar Rp2,4 milyar telah disiapkan Pemprov DKI untuk sistem Community Action Plan (CAP) 2019. Anggaran serupa, menurut rencana akan disiapkan di seluruh kawasan kumuh di Jakarta. "Itu sudah dimasukkan dalam RPJMD dan dalam alokasi anggarannya sudah ada. Sudah masuk dalam alokasi anggaran tahun 2019 ini," tandas Gembong.

Terkait dengan janji Anies semasa kampanye yang akan membangun sanitasi yang sehat di kawasan itu, Gembong pun menyebut, kini masyarakat tinggal menunggu realisasi dari program yang telah dianggarkan itu. "Jadi janji pak Anies sudah tertunaikan masuk dalam RPJMD,

tinggal sekarang implementasi dari janji itu," kata Gembong.

Dengan adanya keluhan warga yang kembali menagih janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gembong pun berharap, Pemprov DKI dapat segera membangun mandi, cuci, kakus (MCK) yang layak bagi warganya. "Saya berterimakasih kepada warga Jakarta Barat yang menagih janji itu. Mudah-mudahan kemudian bisa didengar pak Anies dan segera terwujud apa yang jadi keluhan warga," tutur dia.

Seperti diketahui, belum adanya ketersediaan jamban sehat masih menjadi permasalahan yang ditemui di Jakarta Barat. Salah satu permukiman padat penduduk yang belum memiliki jamban sehat terdapat di RT 15 RW 7 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Mereka adalah warga Gang Sekretaris I yang berbatasan langsung dengan Kali Sekretaris.

Lokasi itu merupakan permukiman padat penduduk, dimana rumah-rumah warga memenuhi sepanjang gang di bantaran kali sekitar 100 meter dengan lebar gang hanya satu meter.

Di tiap permukiman ini, satu toilet yang kondisinya sangat sempit dan kumuh digunakan oleh beberapa kepala keluarga. Ironisnya, lantaran tak memiliki septic tank, kotoran dari toilet tersebut langsung masuk ke dalam paralon dan jatuh di aliran kali yang hanya berjarak satu meter dari toilet tersebut.

Karenanya, tak heran ketika warga sedang berkumpul di teras rumah, mereka melihat kotoran mengambang di bibir kali. Ketua RT 15 RW 07 Tanjung Duren Utara, Sitanggung membenarkan masih banyak warganya yang belum memiliki jamban sehat.

"Mereka memiliki jamban, cuma sistemnya sistem helikopter dalam arti mereka punya kamar mandi tapi pembuangannya langsung ke kali," kata Sitanggung beberapa waktu lalu saat mendatangi Gedung DPRD DKI Jakarta. (aen)

PENANGGULANGAN SANITASI BURUK DI IBU KOTA

- Masuk RPJMD DKI
- Di 2020, diusulkan anggaran sebesar Rp166,2 milyar
- Penataan permukiman kumuh